

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi secara masif tidak hanya memberi dampak pada organisasi sektor bisnis namun juga pada organisasi sektor pemerintahan. Penggunaan *cloud computing*, otomasi, dan juga *big data analytics* kini mulai banyak digunakan oleh organisasi-organisasi di sektor pemerintahan. Aplikasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Bahkan berdasarkan hasil survei *e-government* yang dilaksanakan oleh PBB pada 2022, Indonesia berhasil naik ke peringkat 77 dengan skor *e-Government Development Index* (EGDI) 0.716 yang termasuk dalam kategori “High EGDI” dimana hal ini menunjukkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah berjalan dengan cukup baik (Admin Aptika, 2022).

Pergeseran sistem pemerintahan, pelaksanaan proses bisnis organisasi dan penyediaan layanan yang kini menjadi berbasis elektronik tentu perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Urgensi sistem pengawasan yang dapat

mengimbangi perubahan ini pun diwujudkan melalui pengembangan sistem pendukung audit berbasis komputer yang memungkinkan audit dan *monitoring* kegiatan dilaksanakan dari jauh secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Institute of Internal Auditor (IIA) menerbitkan sebuah pedoman yang diberi nama Global Technology Audit Guide (GTAG) 3 tentang *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM).

CACM mencakup proses *Continuous Audit* (CA) dan pengujian *Continuous Monitoring* (CM) oleh manajemen. CA memanfaatkan kombinasi teknologi sehingga memungkinkan penilaian risiko dan pengendalian yang berkelanjutan. Dengan begitu, auditor internal dapat memberikan jaminan atas informasi secara bersamaan atau segera setelah informasi diungkapkan. Di sisi lain, CM menjadi rangkaian aktivitas yang dilakukan manajemen untuk melakukan pemantauan berkelanjutan apakah pengendalian internal telah beroperasi efektif.

Pada 2023, Kementerian PUPR mengelola anggaran senilai 164,39 T dengan 7.564 paket pekerjaan. Sebagian besar proses bisnis dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi, dimana menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR terdapat lebih dari 300 aplikasi yang menghasilkan lebih dari 600 TB data tersimpan. Sayangnya, untuk mengawasi jalannya proses bisnis tersebut jumlah auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sangat terbatas, yaitu sekitar 198 auditor per November 2023. Kondisi tersebut kemudian membuat proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan memiliki risiko yang dinilai tinggi. Hal ini juga disadari oleh Menteri PUPR, sehingga pada 2022 diterbitkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022 yang

berisi Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Salah satu dari 9 strategi yang digagas, diberi nama Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan CACM.

Implementasi CACM dipandang sebagai suatu terobosan yang mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kini mulai menyusun rancangan implementasi CACM guna meningkatkan kapabilitas auditor internal. Sebagaimana disebutkan dalam kebijakan pengawasan intern Kementerian PUPR tahun 2023, implementasi CACM dimulai dengan melakukan integrasi basis data manajemen risiko dengan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini diperlukan sebagai langkah awal guna memperoleh data pengawasan secara *real time* agar pengawasan dapat dilaksanakan secara proaktif, terus menerus dan dapat memberikan respon yang cepat terhadap informasi yang memerlukan telaah lebih lanjut.

Kebijakan organisasi untuk mengimplementasikan CACM akan memberikan perubahan bagi proses bisnis organisasi. Teknologi menjadi aspek yang penting karena auditor perlu mengembangkan *software audit tools* untuk melakukan analisis atas data elektronik (Hiererra & Sarayar, 2014). Namun di samping itu, organisasi juga memerlukan bentuk dukungan lainnya, seperti dari aspek tata kelola, lingkungan dan sumber daya manusia.

Konsep CACM ternyata telah diadopsi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Grand Design* Implementasi

Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Lingkungan BPKP. Dilakukannya audit berkelanjutan akan memberikan beberapa manfaat bagi organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2018, manfaat dari audit berkelanjutan yang pertama adalah perolehan data terus menerus untuk mendukung kegiatan audit. Kedua, memberikan keyakinan memadai atas objek pemeriksaan. Ketiga, menghemat biaya audit. Keempat, penerbitan laporan yang berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan audit, dan terakhir yaitu adanya rekomendasi yang relevan dan tepat waktu karena dapat mengikuti perkembangan proses bisnis.

Pengembangan CACM oleh BPKP tersebut menarik untuk dijadikan bahan studi komparatif atas pengembangan CACM di Kementerian PUPR. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan CACM bagi kepentingan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan memanfaatkan proses dan pengalaman yang telah dicapai oleh BPKP sebagai instansi pengawasan internal pemerintah. Penelitian ini diberi judul “PENGEMBANGAN *CONTINUOUS AUDIT CONTINUOUS MONITORING* (CACM) PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada akhir 2023 s.d. awal 2024 dimana CACM pada Kementerian PUPR masih berada pada proses penyusunan tata kelola dan pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu, pembahasan penerapan CACM di Kementerian PUPR akan dibatasi pada faktor pemicu, pengembangan aplikasi

beserta implikasinya dengan membandingkan pada praktik yang dilakukan oleh BPKP. Dalam penelitian ini, implementasi atas aplikasi CACM tidak dibahas secara mendalam karena aplikasi tersebut masih belum dirilis dan digunakan secara resmi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup tersebut, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengembangan *continuous audit* dan *continuous monitoring* di BPKP dan Kementerian PUPR?
- 2) Bagaimana implikasi dari perbedaan latar belakang, proses pengembangan dan fitur *continuous audit* dan *continuous monitoring* pada BPKP dan Kementerian PUPR?
- 3) Pelajaran apa yang dapat dipetik dari proses pengembangan *continuous audit* dan *continuous monitoring* di BPKP dan Kementerian PUPR?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk membandingkan antara pengembangan *continuous audit* dan *continuous monitoring* di BPKP dengan di Kementerian PUPR.
- 2) Untuk menganalisis implikasi dari perbedaan latar belakang, proses pengembangan dan fitur *continuous audit* dan *continuous monitoring* di BPKP dan Kementerian PUPR.

- 3) Untuk menganalisis pembelajaran dari proses pengembangan *continuous audit* dan *continuous monitoring* di BPKP dan Kementerian PUPR.

1.5 Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai bahan komparasi antara pengembangan *continuous audit* dan *continuous monitoring* pada BPKP dengan Kementerian PUPR.
- 2) Sebagai bahan analisis atas implikasi perbedaan latar belakang, proses pengembangan dan fitur *continuous audit* dan *continuous monitoring* pada BPKP dan Kementerian PUPR.
- 3) Sebagai bahan pembelajaran bagi organisasi yang juga sedang mengembangkan *continuous audit* dan *continuous monitoring*.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Kelima bab tersebut berisi pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang permasalahan penelitian ini, diuraikan pula gambaran CACM yang diharapkan oleh objek penelitian. Selain itu, juga disampaikan pula ruang lingkup penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi konsep-konsep teori yang relevan mengenai Teori Keagenan dan Peran Auditor Internal, Konsep *Continuous Audit* dan *Continuous Monitoring* (CACM), hubungan antara pengembangan sistem dengan audit internal, serta kesiapan dan proses pengembangan sistem. Bab ini juga memberikan ilustrasi kerangka pemikiran konseptual yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Bab III menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, desain penelitian, sumber data, partisipan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi gambaran umum mengenai objek penelitian serta pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian dibahas dan disajikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yaitu berkaitan dengan faktor pemicu, pengembangan aplikasi CACM, implikasinya serta pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi simpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, disampaikan juga keterbatasan yang dihadapi penulis selama melaksanakan penelitian dan rekomendasi serta saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya.